**Bupati Kudus Ikuti Rapat Paripurna Penyempurnaan Ranperda Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah**

KUDUS- Bupati Kudus HM. Tamzil dan Wakil Bupati HM. Hartopo berserta unsur Forkopinda mengikuti rapat paripurna di DPRD Kudus, Rabu (17/10). Rapat tersebut membahas laporan penyempurnaan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus TA 2018 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Wakil Ketua DPRD Drs H. Ilwani, menyampaikan beberapa poin hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Pertama, mengenai kebijakan umum dan anggaran. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penempatan prioritas pembangunan daerah agar senantiasa konsisten mendukung 10 Bidang Nasional Tahun 2018 sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rancanangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.

Kedua, mengenai pendapatan daerah. Dirinya menyampaikan, penganggaran Pajak dan Retribusi daerah agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada 2018. “Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar disesuaikan dengan peraturan yang melandasinya, Pemerintah Kabupaten Kudus agar senantiasa berkomitmen untuk tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam Undang-undang, penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar memperhatikan tingkat rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, penganggaran lain-lain pendapatan asil daerah yang sah agar mempedomani peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014,” jelasnya.

Ketiga, mengenai belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus agar senantiasa konsisten dan berkesinambungan untuk mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah. Sementara itu untuk anggaran kesehatan dirinya mengatakan, “Pemerintah Kabupaten Kudus agar senantiasa konsisten dan berkesinambungan untuk mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari belanja daerah di luar gaji,”.

Keempat, mengenai pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penetapan anggaran penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) agar dilakukan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran 2017 dan dalam teknis penganggarannya. Soal Penganggaran Penyertaan Modal (Investasi) dirinya mengatakan, “Pemerintah Daerah agar memperhatikan efektivitas pengelolaan serta akuntabiltas, akan digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha yang dimaksud dengan performance based yang baik,”.